



Bulletin **Bappebti**

Mengabdikan Dengan Integritas

BBJ Pasar Utama Olein

**Sinergi BUMN
Genjot SRG**

**BBJ Rancang SDB
Tarik Investor**

**Indonesia Navigasi
Perdagangan Timah Dunia**





4-7

Berita Utama

- Indonesia Navigasi Perdagangan Timah Dunia
- PLB Ikon Baru ICDX

8-9

Berjangka

- BBJ Pasar Utama Olein

10-11

Resi Gudang

- Sinergi BUMN Genjot SRG

12-13

Pasar Lelang

- PLK Bojonegoro Tingkatkan Nilai Tukar Petani

14-15 Agenda Foto

16-17 Aktualita

- BBJ Rancang SDB Tarik Investor
- BBJ Luncurkan FTLC di Ubaya dan UKWK
- BKDI Gandeng 3 Bank Kelola Dana Tax Amnesti
- Inhil Bakal Wujudkan SRG Kelapa

18 Analisa

19 Breaking News

20 Info

21 Info SRG

22-24 KomiKita

Gudang SRG Sokong Swasembada Komoditi Pangan



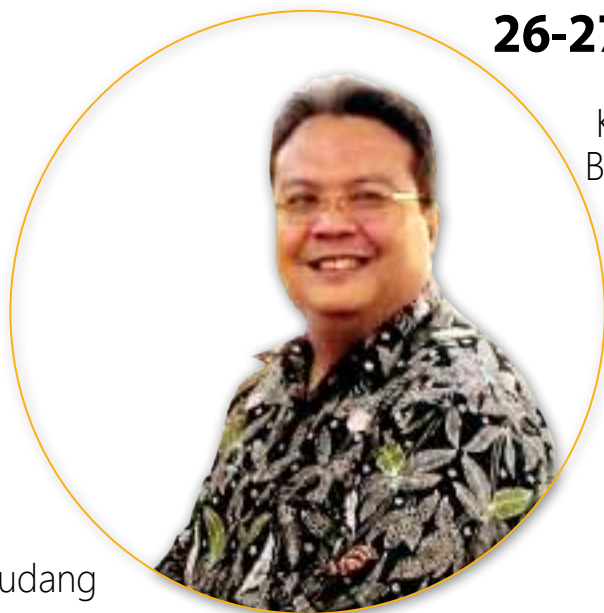
24-25 Kolom

Kredit Modal Kerja dengan Jaminan Resi Gudang



26-27 Kiprah

Literasi Kunci Sukses Bisnis Futures Trading



Tips 7P

1. Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan transaksi pada anda;
2. Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
3. Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
4. Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
5. Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
6. Pelajari risiko-risiko yang dihadapi.
7. Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.



Buletin Bappebti
Mengabdikan Dengan Integritas

Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penanggung Jawab

Bachrul Chairi

Redaktur

Didi Sumedi

Penyunting/ Editor

Taufik KS
Annisa F Wulandari
Aryo Guritno

Fotografer

Apriliyanto
Poppy Juliyanti
Gita Regina

Sekretaris

Katimin

Alamat Redaksi

Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya
No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail:

humas.bappebti@kemendag.go.id



Foto : Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Retno Rukmawati mewakili Kepala Bappebti menghadiri undangan FGD implementasi SRG komoditas garam pada tanggal 20 September 2016 di Gudang Garam Rakyat Desa Raci Kabupaten Pati.

Meningkatkan likuiditas perdagangan komoditi di bursa berjangka yang terpercaya dan diakui pasar internasional bukanlah pekerjaan mudah. Semuanya membutuhkan waktu dan didukung dengan sumber daya yang memadai serta sinergi semua pihak, baik pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah, pelaku pasar, asosiasi komoditi, perbankan serta instansi terkait lainnya.

Demikian antara lain kutipan sambutan Menteri Perdagangan Enggartiaso Lukita, yang disampaikan Kepala Bappebti pada pembukaan acara International Tin Conference and Exhibition- ITCE, 19-20 September 2016 di Nusa Dua Bali. Kegiatan tahunan yang ketiga diselenggarakan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI, itu, mengusung tema "Menavigasi Indonesia untuk Menjadi Pemimpin Dunia dalam Industri Timah." Ada sekitar 250 praktisi timah dari Jepang, Singapura, India, Korea Selatan, Inggris, Amerika dan berbagai negara lainnya.

Lebih jauh diutarakan Bachrul Chairi, meski perdagangan timah saat ini relatif lesu tetapi prospeknya cukup cerah dalam beberapa waktu ke depan. Sebab, kebutuhan logam industri ini bakal terangkat seiring perkembangan otomatisasi, komputerisasi hingga robotisasi yang terjadi di dunia. "Harga timah diprediksi akan kembali rebound pada 2 atau 3 tahun mendatang seiring dengan pulihnya perekonomian global. Bahkan, rencana menaikkan suku bunga acuan oleh The Fed juga

dapat mendorong peningkatan harga timah dunia," ucap Bachrul Chairi, optimis.

Di pihak lain, Bursa Berjangka Jakarta-BBJ terus memacu perdagangan berjangka komoditi Olein- minyak goreng. Direktur BBJ, Donny Raymond, mengatakan, sebagai produsen utama Olein dunia sudah sepatutnya Indonesia memimpin pasar.

"Dan harap diketahui, saat ini hanya Indonesia yang memiliki bursa berjangka yang memperdagangkan kontrak berjangka Olein. Oleh karena itu kami akan mengarahkan BBJ sebagai referensi harga Olein di pasar internasional," katanya.

"Kalau kita mau bicara daya saing produk unggulan ekspor seperti Olein, seharusnya harga referensi ditentukan oleh negara produsen melalui bursa berjangka. Tetapi kenyataannya harga ekspor Olein lebih dipengaruhi faktor-faktor eksternal yang merupakan substitusi Olein," terang Donny Raymond.

Jadi sudah sangat jelas, meningkatkan likuiditas perdagangan komoditi di dua bursa berjangka itu bukanlah tugas dan pekerjaan mudah. Namun, dengan sinergitas dari berbagai pihak dan dilakukannya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, yang lebih khusus pada kalangan pebisnis akan dapat mewujudkan Indonesia sebagai pasar terbesar dan sekaligus produsen komoditi dunia.

Salam!



Indonesia Navigasi Perdagangan Timah Dunia

Indonesia sudah sepantasnya memiliki posisi tawar yang kuat dalam menentukan harga timah dunia. Sebab, Indonesia tercatat sebagai produsen timah terbesar kedua setelah Tiongkok dan merupakan eksportir timah nomor wahid di dunia.

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI yang 'dinobatkan' pemerintah menyelenggarakan Pasar Fisik Timah untuk tahun ketiga menggelar *International Tin Conference and Exhibition- ITCE*. Kegiatan ITCE itu diselenggarakan selama 2 hari, 19-20 September 2016 di Nusa Dua Bali, dan mengundang lebih dari 250 praktisi timah dari Jepang, Singapura, India, Korea Selatan, Inggris, Amerika dan berbagai negara lainnya.

Direktur Utama BKDI, Megain Widjaja, mengatakan, tujuan event ITCE 2016 ini diantaranya, memfasilitasi para praktisi di industri timah dunia untuk bertemu dan saling mengenal, menuntun para praktisi industri timah untuk melakukan bisnis timah dengan cara yang lebih aman dan nyaman, memberikan panduan yang benar bagi para praktisi untuk membuat proyeksi dan rencana jangka panjang

setelah BREXIT sehingga dapat mencapai sukses, dan menambah kepercayaan dunia pada industri timah di Indonesia sekaligus memperluas *networking*.

"Serta memperkuat citra Indonesia sebagai negara kedua penghasil timah terbesar dan terbaik di dunia, dan negara pengekspor timah terbesar di dunia," kata Megain Widjaja dalam sambutannya pada pembukaan ITCE di Nusa Dua Bali. Tema yang diusung BKDI dalam ajang internasional ini cukup menarik, yaitu "Menavigasi Indonesia untuk Menjadi Pemimpin Dunia dalam Industri Timah".

Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, yang mewakili Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam sambutannya juga menjelaskan bahwa Indonesia adalah produsen komoditas tambang timah terbesar kedua setelah Tiongkok. Dengan pangsa produksi sebesar 26% dari total produksi dunia. Di sisi

lain, Indonesia juga tercatat sebagai eksportir timah nomor satu di dunia yang menguasai 70 % pangsa pasar dunia, karena produksi timah Tiongkok lebih banyak diserap oleh pasar domestiknya.

Dari catatan itu, Bachrul menilai, Indonesia harus memiliki peran yang strategis untuk bisa berkontribusi dalam proses pembentukan harga timah dunia. sehingga industri timah Indonesia dapat lebih maju dan menjadi pemimpin di dunia.

"Selama ini, penentuan harga timah dunia didominasi *London Metal Exchange- LME* di Inggris. Ini tentunya merugikan Indonesia sebagai produsen karena yang menentukan harga ialah negara yang tidak punya produk timah," tegas Bachrul.

Indonesia baru memiliki pasar komoditas berjangka untuk timah dalam waktu tiga tahun terakhir, yaitu dengan

lahirnya Pasar Fisik Timah di BKDI yang diluncurkan pada 30 Agustus 2013 silam. Meskipun nilai transaksinya masih relatif kecil, Bachrul yakin, pasar fisik ini lambat laun menjadi acuan harga timah dunia. "Dengan kondisi ini Indonesia bukan hanya sebagai *price taker*, tapi lebih tinggi lagi yakni *price maker*," katanya.

Menurut Bachrul Chairi, perdagangan timah di bursa dapat meningkatkan transaksi perdagangan timah di Indonesia. Tapi, untuk membangun bursa timah yang likuid, terpercaya dan diakui pasar internasional bukan tugas yang mudah. "Semuanya membutuhkan waktu dan didukung dengan sumber daya yang memadai serta sinergi semua pihak, baik pemangku kepentingan ditingkat pusat maupun daerah, pelaku pasar, asosiasi komoditi, perbankan serta Instansi terkait lainnya," papar Bachrul.

Di samping itu, Bachrul mengatakan, prospek timah masih cerah dalam beberapa waktu ke depan. Kebutuhan logam industri ini bakal terangkat seiring perkembangan otomatisasi, komputerisasi hingga robotisasi yang terjadi di dunia. Tapi, masifnya penambangan timah sejak ratusan tahun lalu berpeluang menggerus cadangan timah di Indonesia. Diperkirakan, dalam waktu 10-15 tahun mendatang, cadangan timah domestik bakal habis.

"Sebab itu, penambangan timah yang lebih tertata dapat menjaga stabilitas cadangan, terutama tata niaga yang lebih *sustainable*. Jadi, transaksi di Pasar Fisik Timah dinilai dapat menjaga keberlangsungan industri logam tersebut," ujar Bachrul Chairi.

Sekedar catatan, transaksi perdagangan timah di BKDI pada 2013 sebanyak 18.000 ton timah, kemudian meningkat menjadi 54.000 ton pada 2014. Selanjutnya terus meningkat menjadi 70.000 ton pada 2015 dan pada semester I/2016 mencapai 32.600 ton timah.

Di sisi lain, Bachrul meyakini harga timah akan kembali *rebound* pada 2-3 tahun mendatang seiring dengan pulihnya perekonomian global. Bahkan, rencana

penaikan suku bunga acuan oleh The Fed (Bank sentral Amerika Serikat) juga dapat mendorong peningkatan harga timah dunia. "Kalau The Fed menaikkan suku bunga, indikasi perekonomian dunia membaik. Kalau pertumbuhan ekonomi positif, industri timah akan lebih cerah," ujarnya.

Selain itu, tambah Bachrul Chairi, banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan harga timah dunia, seperti produksi timah, permintaan produk timah hingga stabilitas perekonomian dunia.

Terkait itu, Megain Widjaja menuturkan, keberadaan Pasar Fisik Timah di Indonesia telah berdampak besar terhadap tata niaga penjualan logam tersebut. Kini, timah asal Indonesia memiliki standar yang sama dengan memberikan nilai tambah dalam perdagangan internasional.

"Royalti timah itu sebesar 3 % dari harga jual, sehingga kalau tidak ada standar, negara dirugikan. Bursa komoditi bisa membuat standarisasi yang bisa menjadi acuan," katanya.

Megain juga mengatakan, keberadaan Pasar Fisik Timah di BKDI dapat menjawab persoalan penjualan timah secara ilegal. Bayangkan saja, Malaysia dan Singapura yang tidak memiliki penambangan timah dalam jumlah besar, justru pernah menjadi pengekspor timah paling besar di dunia.

Kini, setiap timah yang diperdagangkan di bursa komoditi harus jelas asal-usulnya dengan keterangan lingkungan yang lengkap. "Penjual harus mengikuti standar, sehingga pembeli mendapatkan garansi pasokan serta kualitas," katanya.

Megain mengaku gembira, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pelaku pasar dunia telah bergantung pada Indonesia sebagai rujukan harga timah fisik dunia. Misalnya, LME mulai mengikuti harga acuan timah yang diperdagangkan di BKDI. Memang diakui transaksi timah di BKDI baru diramalkan oleh 35 penjual dan 29 pembeli. Sebab itu dia berharap, semakin ramainya pelaku pasar di bursa komoditas itu akan menjadi





penentu harga pasar timah dunia yang masih tertekan. Meski begitu, penjual timah di BKDI telah tumbuh 400 % dan pembeli 107 % semenjak awal.

"Keberadaan BKDI juga membuat transaksi ekspor timah dari tanah air meningkat 33 %," tutur Megain.

Fakta lain juga menunjukkan, fluktuasi harga timah di pasar global semakin stabil. Pergerakan harga timah di Indonesia pada 2011 mencapai 28,24 %, sedangkan setelah adanya BKDI pada periode Januari-Juli 2016 hanya mencapai 14,06 %. Pada posisi Januari 2016 harga timah di BKDI sempat berada di level US\$ 14.024 per ton. Namun harga ini

terus meningkat secara signifikan, hingga menyentuh harga rata-rata sebesar US\$ 19.000 pada Agustus 2016.

Ekspor Ilegal

Usaha untuk menghentikan ekspor timah ilegal di Indonesia nampaknya masih menapaki jalan panjang. Sebab, menurut Ketua Asosiasi Eksportir Timah Indonesia- AETI, Jabin Sufianto, Malaysia sebagai pasar transit komoditas timah Indonesia masih menampung bahan baku timah yang dilarang untuk diekspor dengan volume 1.000-1.500 ton per tahun.

"Malaysia masih menerima pasir

timah dari Indonesia. Padahal, sejak 2007 ekspor mineral mentah sudah dilarang pemerintah," ujar Jabin. Hal itu, imbuhnya, bisa dilihat dari data ekspor dari Badan Pusat Statistik- BPS yang tidak sama dengan data importir timah Indonesia.

"Mereka melapor menerima lebih banyak dan Malaysia salah satu yang mengatakan masih menerima pasir timah dari kita," ungkap Jabin.

Selain Malaysia, Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor timah ilegal dari Indonesia. Jabin mencatat, ada 19,5 ton timah yang diekspor secara ilegal ke 'negeri tirai bambu' itu pada 2015. "Kecil memang, tapi itu yang terdata. Kita tidak

tahu yang tidak terdata. Sejak saya jadi Ketua AETI, tahun ini yang paling banyak isu kebocoran, tapi sayangnya saya tidak punya bukti. Ini yang membuat kinerja ekspor kita tidak maksimal," urai Jabin.

Sementara itu, volume ekspor timah Indonesia pada 2015 mencapai 70.310 ton atau turun 5,2 % dari 2014. Selama Januari-Juni 2016, ekspor timah Indonesia yang tercatat BPS mencapai 29.652 ton atau turun 24,6 % dari periode yang sama tahun lalu sebesar 39.359 ton.

Modus yang biasa digunakan para eksportir ilegal ialah lewat penyelundupan antar pulau. Ekspor dinilai lebih mudah bila dilakukan di daerah atau pulau yang

bukan penghasil timah. "Isu dari Surabaya juga ada. Apalagi, daerah yang pegawai Bea dan Cukai-nya awam dengan timah. Penyelundup bilang itu pelat besi. Mereka percaya dan keluarkan. Kalau pegawai yang paham, mereka pasti lebih jeli," jelas Jabin.

Karena itu, dia berharap pemerintah bisa membenahi hal tersebut agar timah Indonesia bisa berperan dalam pergerakan harga timah dunia. "Pemerintah dan pengusaha harus bisa meyakinkan pasar global bahwa penambangan dan ekspor timah ilegal akan diberantas."

Di samping itu, dari sisi produksi,

kapasitas terpasang pabrik pemurnian timah di Indonesia baru mencapai utilisasi 21 % dari total kapasitas 268.000 ton. Utilisasi itu terbilang paling rendah sejak 15 tahun terakhir.

"Utilisasi 21 % terjadi karena banyaknya kebocoran dan ekspor pasir timah ilegal. Indonesia tidak perlu lagi membangun smelter timah, karena ekspor tahun ini diprediksi hanya sekitar 60.000 ton," ucapnya.

PLB Ikon Baru ICDX



Direktur Utama ICDX, Megain Widjaja

Pusat Logistik Berikat- PLB menjadi salah satu program pemerintah yang tercantum dalam paket kebijakan ekonomi jilid II. Melihat kebijakan tersebut, BKDI pun ikut ambil bagian. Menurut Megain Widjaja, BKDI telah membangun dan mendirikan PLB yang disebut dengan ICDX Logistik Berikat- ILB. Di tahap awal, komoditi yang disimpan di ILB adalah komoditi timah. Lokasi ILB terletak di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara dengan lahan seluas 15.141 meter persegi. Sedangkan luas bangunan

gudangnya sekitar 1.200 meter persegi.

Megain Widjaja cukup optimis jika beroperasinya ILB akan membuat Indonesia lebih kompetitif serta dapat menjadi salah satu strategi yang tepat untuk membuat pelaku pasar dunia bertransaksi timah di bursa Indonesia. "ILB dibangun dengan fasilitas terbaik seperti di Singapura untuk menyimpan timah dan dilengkapi dengan CCTV," tuturnya.

Dia juga menjanjikan bahwa ILB akan memberikan rasa aman dan terlindungi,

karena ILB akan menjadi kawasan internasional, sehingga kebal terhadap perubahan peraturan pemerintah Indonesia.

Selama ini, ungkap Megain, perdagangan timah dari Indonesia parkir di Singapura dan Malaysia, padahal mereka hanya trader timah dari Indonesia. Akibatnya Indonesia telah kehilangan potensi pendapatan negara lebih dari US\$ 16 juta setara dengan Rp 209,9 miliar setiap tahunnya. Jadi, dengan ILB para importir dan pembeli tidak perlu lagi menyimpan timahnya di negara lain seperti Singapura, melainkan di Indonesia.

"Dijadwalkan ILB akan akan beroperasi paling cepat pada bulan Oktober 2016. Saat ini proses yang sedang berjalan ialah verifikasi izin dari BKDI untuk membangun ILB," kata Megain Widjaja.

Di kesempatan yang sama, Kepala Seksi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor- KITE Ditjen Bea dan Cukai, Dorothea Sigit menjelaskan akan ada dua skema ekspor di PLB. Pertama, ekspor melalui PLB akan ditetapkan sebagai barang ekspor dengan pembayaran royalti, pajak ekspor,

dan ketentuan izin ekspor lainnya.

"Untungnya, bagi bursa berjangka, kalau mereka memprediksikan, harga barang atau nilai royalti naik tahun depan, mereka bisa bayar dengan nilai sekarang untuk transaksi nanti," paparnya.

Skema kedua, yaitu barang yang akan diekspor akan berstatus barang yang ditaruh atau dititipkan. Dengan demikian, itu tidak perlu kena bea masuk jika sebagian akan dijual untuk pasar lokal. "Dengan ILB, efisiensi yang akan tercipta bisa mencapai 20 %. Dalam jangka panjang, itu akan membuat Indonesia menguasai suplai timah dunia," ucap Dorothea Sigit.

Komoditas Bursa

Mengokohkan posisi Indonesia sebagai produsen timah terbesar kedua dan eksportir terbesar di dunia, BKDI bergegas menyambut paket kebijakan ekonomi jilid II yang dikeluarkan pemerintah dengan membangun dan mendirikan ICDX Logistik Berikat- ILB.

Direktur Utama ILB, Henry Chandra, mengungkapkan, ILB merupakan anak perusahaan dari ICDX (BKDI) dan PT Indonesia Cliring House. Sebab itulah



Direktur Utama ILB, Henry Chandra

menggunakan nama ICDX Logistik Berikat. "Terkait pendirian anak perusahaan itu, kami sudah melapor ke Bappebti. Sedangkan pengurusan perizinannya diproses Dirjen Bea dan Cukai."

"ILB ke depan akan menjadi gudang penyimpanan komoditi yang diperdagangkan di BKDI. Tahap awal ini adalah komoditi timah. Tapi ke depan bisa saja komoditi karet, dan lainnya," jelas Henry.

Untuk mengoperasikan pusat berikat tersebut, ILB akan berkerjasama dengan PT Bhanda Ghara Rekha (Persero) dan PT Tantra Karya Sejahtera. Dua

perusahaan tersebut adalah pengelola gudang penyimpanan timah yang ditunjuk BKDI dan memperoleh izin dari Bappebti dalam rangka penyelenggaraan pasar fisik timah.

"Bisa saja nantinya dua perusahaan itu sebagai operator ILB. Karena mereka memiliki pengalaman yang cukup panjang soal pergudangan dan penyimpanan. Jadi mungkin nantinya bisa diumpamakan seperti, ILB sebagai induk semang dan dua perusahaan itu menjadi anak kos," kata Henry Chandra.



BBJ Pasar Utama Olein

Komoditi Olein- minyak goreng tak melulu konsumsi di dalam negeri. Dengan produksi Olein sebesar 19,4 juta ton, sudah sepatutnya Indonesia memimpin pasar dan menjadi acuan harga dunia.

Bursa Berjangka Jakarta-BBJ sejak beroperasi 15 Desember 2000 telah memperdagangkan kontrak berjangka komoditi Olein- minyak goreng. Pemilihan perdagangan kontrak berjangka Olein dilatarbelakangi posisi Indonesia sebagai negara produsen utama di dunia untuk komoditi *crude palm oil*- CPO. Dan Olein dihasilkan dari CPO.

Dikutip dari data Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia- Gapki, tahun 2016 produksi CPO Indonesia mencapai 33 juta ton. Sedangkan produksi Olein mencapai 19,4 juta ton. Untuk konsumsi di dalam negeri, berkisar 5,5 juta ton dan selebihnya di ekspor ke berbagai negara seperti Tiongkok, India, Timur Tengah dan Eropa.

Di sisi lain, perdagangan kontrak berjangka Olein di BBJ dikarenakan promotor dan sekaligus pemegang saham BBJ seperti diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 1997 dan kemudian disempurnakan menjadi UU No. 10 Tahun

2011, tentang perdagangan berjangka komoditi, terdapat sejumlah produsen CPO berskala nasional maupun Badan Usaha Milik Negara- BUMN. Diantaranya PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Wilmar Tbk., PT Smart Tbk., PT Asian Agri Tbk., PT Permata Hijau Sawit, PT Minanga Ogan, PT Panca Nabati, PT Parasaita dan Bakrie Grup.

Namun dalam perjalanannya, kontrak berjangka Olein BBJ mengalami pasang surut dampak tren perdagangan berbasis produk keuangan di luar bursa. Bahkan di awal tahun 2009, kontrak berjangka Olein BBJ sempat tak disentuh para pelaku pasar. Tetapi pada semester kedua 2009 hingga saat ini, kontrak berjangka Olein menjadi salah satu kontrak berjangka penyumbang volume terbesar dari sejumlah kontrak berjangka BBJ.

Referensi Internasional

Direktur BBJ, Donny Raymond, dalam kesempatan bincang-bincang dengan media baru-baru ini,

mengatakan, sebagai produsen utama Olein dunia sudah sepatutnya Indonesia memimpin pasar. “Dan harap diketahui, saat ini hanya Indonesia yang memiliki bursa berjangka yang memperdagangkan kontrak berjangka Olein. Oleh karena itu kami akan mengarahkan BBJ sebagai referensi harga Olein di pasar internasional,” katanya.

“Kalau kita mau bicara daya saing produk unggulan ekspor seperti Olein, seharusnya harga referensi ditentukan oleh negara produsen melalui bursa berjangka. Tetapi kenyataannya harga ekspor Olein lebih dipengaruhi faktor-faktor eksternal yang merupakan substitusi Olein,” terang Donny.

Lambat tapi pasti, tambah Donny Raymond, kontrak berjangka Olein BBJ akan menjadi kontrak yang likuid di pasar dan acuan harga internasional. “Sejumlah strategi sudah kami persiapkan ke arah itu. Namun, strategi apa yang akan digunakan itu menjadi rahasia perusahaan,” katanya berseloroh.

“Tetapi yang jelas, edukasi dan sosialisasi tentang perdagangan kontrak berjangka Olein kepada masyarakat akan menjadi prioritas. Karena ada peribahasa mengatakan, ‘tak kenal maka tak sayang’. Dan kami harus mengakui, bahwa selama ini kontrak berjangka Olein kurang disosialisasikan kepada masyarakat,” ujar Donny.

Sementara itu, Plt Kepala Divisi Riset dan Pengembangan Usaha BBJ, Isa Abiyasa Djohari, menjabarkan, BBJ saat ini memusatkan perhatian pada kontrak berjangka Olein dikarenakan komoditi Olein sudah menjadi komoditi internasional. Selain itu, posisi Indonesia sebagai salah satu produsen utama CPO dunia juga memudahkan produksi Olein berjalan dalam jumlah yang besar. “Hanya saja kenapa selama ini transaksi multilateral olein paling kecil, alasannya cuma satu yakni faktor kedekatan dan keterkenalan publik,” ujar Isa.

“Pelaku pasar selama ini banyak yang tidak tahu bahwa Olein itu adalah minyak goreng. Sehingga kalah pamor jika dibandingkan kontrak berjangka komoditi BBJ lainnya seperti emas dan kopi,” jelas Isa.

Lebih jauh dijabarkan Isa, Olein sebagai produk turunan dari CPO, harganya sangat dipengaruhi pergerakan harga CPO. Oleh karena itu, tren positif harga CPO saat ini turut berdampak kepada harga Olein. “Selain dipengaruhi harga CPO, pergerakan harga Olein juga dipengaruhi komoditas substitusinya seperti *soybean* dan *corn oil*. Sebagai contoh, jika terjadi gagal panen komoditas *soybean* dan *corn oil* yang dipengaruhi faktor cuaca, maka harga Olein cenderung naik,” katanya.

Sebagai gambaran, harga Olein 20 ton kontrak November 2016 ditutup ke Rp 10.720 per kg setelah menguat 80 poin. Sementara itu, harga Olein 10 ton untuk kontrak Desember 2016 tumbuh 50 poin menjadi Rp 10.700 per kg. Pada hal, per 4 Januari 2016 lalu, harga Olein 20 ton dan Olein 10 ton untuk kontrak Juni 2016



Direktur BBJ, Donny Raymond

dipatok Rp 7.785 serta Rp 7.695 per kg. “Itu artinya, sepanjang tahun 2016 ini harga Olein masing-masing meningkat 37,7 % untuk Olein 20 ton dan 39,05 % untuk Olein 10 ton,” tutur Isa Abiyasa Djohari.

Data yang dihimpun dari BBJ, transaksi Olein hingga awal September

2016 untuk kontrak Olein 20 ton telah mencapai 51.000 lot, sedangkan Olein 10 ton sebanyak 26.000 lot. Sedangkan target yang akan dicapai di tahun 2016 yakni dikisaran 42.000 lot untuk Olein 20 ton dan sebesar 57.000 lot untuk Olein 10 ton. 📌

Volume Transaksi Olein BBJ				
Kontrak	2012	2013	2014	2015
1. 20 lot	21.959	55.725	22.592	30.056
2. 10 lot	10.280	30.607	29.420	30.056

Sumber; Bappebti

Spesifikasi Kontrak Berjangka Olein BBJ	
1. Lot	20 ton – 10 ton
2. Mutu	Standar Pasar
3. Denominasi	Rupiah
4. Tick	Rp 5 / kg
5. Bulan Kontrak	6 bulan berturut-turut
6. Waktu Perdagangan	Senin – Jumat (09.30 - 17.30 WIB)
7. Tempat Penyerahan	Tangki terdaftar di Jakarta dan Surabaya

Sumber; JFX



Sinergi BUMN Genjot SRG

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) menjalin kerjasama dengan PT Bhanda Ghara Reksha (Persero)- BGR untuk meningkatkan bisnis Sistem Resi Gudang (SRG).

Perum Jamkrindo maupun PT BGR merupakan perusahaan milik negara alias Badan Usaha Milik Negara- BUMN. Kedua perusahaan pelat merah ini memang telah berkecimpung dalam bisnis SRG. Bedanya, PT BGR sudah cukup lama terjun dalam bisnis SRG, sedangkan Perum Jamkrindo masih terhitung sebagai pemain baru.

Sinergi kedua BUMN itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama- MoU untuk menggarap bisnis SRG, pada Senin (19 Agustus 2016), di Kantor Pusat Perum Jamkrindo, Jakarta. Naskah kerjasama itu ditandatangani oleh Direktur Utama Perum Jamkrindo Diding S. Anwar dan Direktur Utama PT BGR, R Ruli Adi.

"Penandatanganan nota kesepahaman ini sebagai bentuk sinergi BUMN terhadap potensi yang dimiliki oleh

masing-masing pihak. PT BGR sebagai pemilik gudang dan penerbit sertifikasi Resi Gudang akan sangat membantu tugas Perum Jamkrindo dalam menjalankan Penjaminan SRG," jelas Diding S. Anwar dalam keterangannya kepada media.

Diding menilai, kemitraan yang dijalin dengan PT BGR terbilang strategis yang bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan bisnis kedua perusahaan serta meningkatkan kinerja masing-masing pihak sehingga tercapai sinergi BUMN yang lebih baik.

Diharapkan dengan kerjasama ini, manfaat penjaminan SRG bisa langsung dirasakan masyarakat khususnya petani dan korporasi dalam hal jika terjadi kegagalan, ketidakmampuan dan atau kebangkrutan pengelola gudang dalam menjalankan kewajibannya.

Sebagai informasi, Perum Jamkrindo telah ditetapkan sebagai Lembaga

Pelaksana Penjaminan SRG berdasarkan Undang – Undang No. 9 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 9 tahun 2006 tentang SRG serta Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan SRG.

Perum Jamkrindo sesuai dengan UU No 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan tentunya dibantu oleh lembaga perbankan dan lembaga keuangan atau diluar lembaga keuangan siap memberikan kredit, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau kontrak jasa kepada UMKM.

"Jamkrindo selalu siap berkontribusi dengan menyerap risiko pembiayaan yang dikururkan perbankan dan non perbankan kepada UMKM dengan penjaminan kreditnya, baik program penjaminan kredit program KUR maupun penjaminan kredit lainnya," kata Diding.

Guna meningkatkan pelayanan kepada mitra kerja, Perum Jamkrindo telah memiliki jaringan pelayanan di seluruh Indonesia. Hingga saat ini Jamkrindo total memiliki 56 Kantor Cabang dan 13 Kantor Unit Pelayanan.

Sementara itu, PT BGR memiliki tiga peran utama dalam bisnis SRG. Menurut Dirut PT BGR, R. Ruli Adi, perseroan memiliki tugas sebagai pengelola gudang, pembina calon pengelola gudang, dan penguji kesesuaian gudang. Sebagai pengelola gudang SRG, perseroan berupaya meningkatkan area layanan yang ada.

"BGR juga berperan melatih dan mensupervisi calon pengelola gudang dalam waktu enam bulan hingga setahun," jelas Ruli.

Sebagai penguji kesesuaian gudang, BGR berfungsi melakukan survey kelayakan gudang SRG. Kelayakan gudang tersebut dinilai dari format kelayakan standard gudang yang ada, kesiapan gudang dengan segala sarana dan prasarana, serta kesiapan gudang untuk digunakan dan terhindar dari resiko kehilangan berat atau kesusutan karena faktor eksternal.



Sepanjang tahun 2016 ini, BGR telah mengelola sebanyak 24 gudang SRG yang tersebar di 24 kabupaten. Sedangkan untuk resi gudang yang telah diterbitkan sepanjang 2016, yakni sebanyak 42 resi gudang dengan jumlah tonase sejumlah 758.438 ton.

"Sekitar 86,7 % komoditi yang disimpan dan telah diterbitkan resi gudangnya adalah gabah, sisanya yakni komoditi kopi, rotan dan jagung. Juga terdapat komoditas rumput laut yang disimpan di gudang SRG," terang Ruli.

BGR sebagai BUMN penyedia jasa logistik terintegrasi yang didukung dengan infrastruktur hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah cabang sebanyak 24 cabang, juga memiliki sistem teknologi informasi serta SDM yang profesional. Dan melalui moto *Integrated Logistics Solution*, perseroan ini memberikan pelayanan logistik yakni, *BGR Integrated Logistics Solution-ILS*, *BGR Transportation*, *BGR Warehousing*, *BGR Freight Forwarding*, dan *BGR Express*.

Sosialisasi

Dalam acara penandatanganan MoU, terselip pesan Dirut PT BGR, R. Ruli Adi. Dia berharap sosialisasi SRG dapat dilakukan dengan optimal oleh seluruh pemangku kepentingan yang

ada, termasuk Jamkrindo dan PT BGR.

"Harapannya SRG tidak hanya diposisikan sebagai fungsi gudang yaitu penumpukan sementara ataupun sebagai agunan ke pendana, namun SRG dapat dilihat sebagai suatu *entitas logistik-supply chain*," tuturnya.

Jika bicara sosialisasi, Diding menyampaikan, Perum jamkrindo telah aktif melakukan hal tersebut. Hingga saat ini, Jamkrindo telah melakukan sosialisasi kepada kepada petani dan pelaku usaha di Medan, Parapat, Palembang dan Samosir.

Di sisi lain, BUMN ini juga telah melakukan kajian SRG hingga ke Bulgaria. "Kesuksesan Bulgaria menerapkan SRG membuat kami tertarik untuk mempelajarinya. Kunjungan lapangan dan diskusi langsung dengan para pelaku di Bulgaria dirasa akan cukup membekali Perum Jamkrindo untuk mengembangkan SRG di dalam negeri," ungkap Diding S. Anwar. 





PLK Bojonegoro Tingkatkan Nilai Tukar Petani

Pasar Lelang Komoditas-PLK yang digagas secara mandiri Pemda Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, terbilang cukup berhasil dengan transaksi lebih dari Rp 112 miliar. Dalam jangka menengah PLK Bojonegoro diharapkan bisa meningkatkan Nilai Tukar Petani dan memangkas rantai distribusi.

Jika bicara PLK yang ada di Provinsi Jawa Timur, biasanya tak lepas dari keberadaan pasar lelang yang dikelola PT Puspa Agro. Hal itu lantaran pasar lelang ini cukup populer karena rutin melakukan kegiatan lelang. Tak hanya itu, pasar lelang ini juga di bina dan diawasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim serta berada di bawah pengawasan dan pembinaan Bappebti.

Meski begitu, di Jawa Timur ternyata tak hanya memiliki PLK yang dikelola PT Puspa Agro. Di daerah ini ada juga PLK yang diselenggarakan oleh Pemkab Bojonegoro. Kasi Pengadaan dan Penyaluran Disperindag Kab. Bojonegoro, Yudhistira A. Nugraha, menjelaskan, Bojonegoro semula hanya sebagai peserta dalam pengembangan pasar lelang daerah yang menjadi program Disperindag Provinsi Jatim.

“Dulu Bojonegoro hanya menjadi peserta dalam pengembangan pasar lelang daerah yang digelar Disperindag Provinsi Jatim,” jelasnya.

Tapi seiring perkembangan yang ada, tambah Yudhistira, Kab. Bojonegoro kemudian menggelar pengembangan pasar lelang daerah sendiri untuk meningkatkan pemasaran sejumlah komoditas. Sebagai bukti, Selasa, 27 September 2016 lalu, Disperindag Bojonegoro telah menggelar PLK di Griya MCM Bojonegoro.

Sementara itu, Kepala Disperindag Kab. Bojonegoro, Basuki, mengatakan, kegiatan ini merupakan pengembangan dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Provinsi Jatim untuk memfasilitasi dan membantu para petani untuk dapat bertemu dengan pembeli secara langsung.

“Rencananya kegiatan ini akan

dilakukan setahun dua kali, agar hasil panen petani tidak sampai menumpuk dan mengalami penurunan harga,” kata Basuki.

Dia juga menambahkan, kegiatan PLK dilakukan untuk memangkas rantai distribusi yang panjang, sehingga berdampak pada perbedaan harga antara petani dan tengkulak. “Petani yang sudah bekerja keras namun justru mereka tidak bisa menikmati tingginya harga komoditi di pasaran,” katanya.

“Dengan adanya kegiatan PLK ini, dalam jangka menengah akan membawa dampak yang luar biasa, salah satunya meningkatnya Nilai Tukar Petani- NTP. Kegiatan ini adalah ajang pertemuan antara penjual dan pembeli dan mereka bisa langsung melakukan transaksi,” tutur Basuki.

Selain menghadirkan para petani lokal Bojonegoro, Disperindag Bojonegoro juga mengundang berbagai pengusaha dan pedagang pasar induk Puspa Agro dan kantor perwakilan dagang. “Yang hadir di PLK Bojonegoro ini antara lain yaitu kantor perwakilan dagang dari Nusa Tenggara Timur, Ambon dan Maluku,” imbuhnya.

Tak dipungkiri kegiatan PLK ini memang cukup menyedot perhatian. Misalnya saja, Ludowyk Umbu Lado, seorang pedagang asal NTT. Dia mencari beras yang harga standarnya sekelas harga Bulog dalam kemasan 25 kilogram dan membutuhkan 1000 ton yang akan dikirim 2 sampai 3 bulan sekali. “Karena Bojonegoro adalah daerah lumbung padi sehingga saya sengaja datang ke Bojonegoro untuk menghadiri kesempatan ini,” kata Ludowyk Umbu Lado.

Adapun Kisworo, seorang petani dari Kecamatan Bubulan, Kab Bojonegoro mengakui bahwa dirinya sudah kali kedua mengikuti kegiatan PLK ini. Menurutnya, pasar lelang ini jauh lebih menguntungkan karena harganya stabil. “Saya menjual jagung yang memiliki kualitas super dan dibeli dengan harga Rp 3.000 – 3.500 per kilogram,” bebernya.



Transaksi Rp 112,130 miliar

Kab. Bojonegoro sudah sejak dahulu dikenal sebagai salah satu daerah penyangga komoditas pangan dan berbagai komoditas lainnya. Diantaranya palawija, padi, rempah serta aneka kekayaan alam berupa umbi-umbian. Tak heran, aneka ragam komoditas dipasarkan dalam kegiatan PLK. Mulai dari beras, jagung, bawang merah, singkong, gaplek, kedelai, kacang hijau, rempah seperti kunyit dan jahe. Selain itu ada juga produk peternakan seperti telur, sapi dan kambing.

Adapun untuk nilai transaksinya cukup fantastis, yaitu mencapai Rp 112,130 miliar. Ketua Panitia Pengembangan Pasar Lelang Daerah Disperindag Bojonegoro, Abdul Aziz, mengatakan, jumlah itu meningkat dibandingkan dengan transaksi dalam pasar lelang serupa pada Agustus tahun lalu yang hanya Rp39,4 miliar.

“Meningkatnya nilai transaksi itu karena jumlah pembelinya juga meningkat. Tahun lalu pembeli dalam pengembangan pasar lelang daerah hanya lima pembeli, tapi sekarang ini diikuti 12 pembeli dari berbagai daerah,” terang Aziz.

Selain itu, tambah Aziz, meningkatnya transaksi juga karena ada sebuah perusahaan yang melakukan pembelian jagung dalam jumlah yang cukup besar. “Jumlah komoditasnya juga meningkat yang semula hanya 14 komoditas, sekarang menjadi 17 komoditas,” kata Abdul Aziz.

Ada beberapa komoditas yang menyumbang transaksi terbesar. Diantaranya komoditi beras, jagung, dan tembakau. Selain itu, ada juga transaksi bawang putih, gaplek kering, kacang hijau, kencur kering, kacang tanah, kencur basah dan komoditas lainnya.

Sebagai gambaran, produksi komoditi padi dari Kab. Bojonegoro pada tahun 2015 mencapai 907.837,5 ton, komoditi jagung 225.795 ton, kedelai 27.907 ton, kacang tanah 4.764 ton, kacang hijau 19.513 ton, dan komoditi tebu sebesar 135.926 ton.

Di samping penghasil berbagai macam komoditas pangan, Kab. Bojonegoro juga dikenal memiliki cadangan minyak dan gas bumi- migas. Karenanya di daerah ini terdapat sejumlah usaha tambang Migas yang dikelola berbagai korporasi. 📍





Sosialisasi Tax Amnesty kepada Pegawai Bappebti

Kepala Bappebti Bachrul Chairi membuka acara Sosialisasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang diselenggarakan Bappebti bekerjasama dengan kantor konsultan pajak Ecovis dan Solid Consulting di Jakarta, Rabu (7/9).

Turut hadir di acara, antara lain Sekretaris Bappebti, Didi Sumedi; Kepala Biro Pembinaan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti, Pantas Lumban Batu; dan Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Bappebti, Retno Rukmawati.

Sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kepada seluruh pegawai Bappebti sehubungan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Peserta sosialisasi terdiri dari para pejabat eselon dan sekitar 75 orang pegawai dan pensiunan Bappebti.



Rapat Koordinasi Bappebti dengan Perwakilan BI se-Jawa

Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Retno Rukmawati mewakili Kepala Bappebti memberikan masukan tentang pelaksanaan SRG kepada Para Kepala Perwakilan BI se-Jawa, di Gudang SRG Kabupaten Cianjur, 16 September 2016 lalu.

Dalam pertemuan itu, para Kepala Perwakilan BI se-Jawa mendapat gambaran tentang pelaksanaan SRG di Kabupaten Cianjur untuk mensinergikan program antar instansi/lembaga di daerah dalam mendorong optimalisasi implementasi SRG.



Kepala Bappebti Hadiri Rakernas Perpadi

Kepala Bappebti, Bachrul Chairi menghadiri acara Rakernas Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) tahun 2016 di Hotel Ibis Cawang, Jakarta, Kamis (22/09).

Pada kesempatan ini, Bachrul menjelaskan implementasi Sistem Resi Gudang untuk komoditas gabah dan beras, dimana anggota Perpadi memiliki peluang pengembangan bisnis dalam pelaksanaan SRG. Peluang itu diantaranya, peningkatan dan efisiensi permodalan, peningkatan kapasitas produksi beras, sebagai *standby buyer* dan pengelola gudang SRG, dan efisiensi biaya pengelolaan barang dan transportasi dengan menjadikan gudang anggota Perpadi sebagai gudang SRG.

Turut hadir Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK, Retno Rukmawati dan jajaran yang membuka layanan klinik konsultasi pelaksanaan SRG bagi anggota Perpadi yang tertarik memanfaatkan SRG.

FGD Analisis Model Regulasi Persetujuan PTT dan Kontrak

Bappebti bekerjasama dengan Tim Konsultan mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Analisis Model Regulasi Persetujuan PTT dan Kontrak di Hotel Bluesky, Jakarta (13/9). FGD ini merupakan FGD lanjutan setelah sebelumnya dilaksanakan FGD pertama pada tanggal 8 Agustus 2016 lalu.

Hadir untuk membuka FGD kali ini adalah Sekretaris Bappebti, Didi Sumedi selaku Plt. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, didampingi oleh Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Pantas Lumban Batu beserta Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Sri Hariyati.

Peserta dalam FGD lanjutan ini adalah Direktur Utama PT. Bursa Berjangka Jakarta, Direktur Utama PT. Indonesia Clearing House, Kepala Divisi PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, Kepala Divisi PT. Kliring Berjangka Indonesia, Perwakilan Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan, dan Kepala Bagian Bappebti terkait PTT dan Kontrak.



BBJ Rancang SDB Tarik Investor

Bursa Berjangka Jakarta-BBJ tengah merancang Sentra Dana Berjangka- SDB untuk menarik investor ke bursa berjangka. Di sisi lain, keberadaan SDB diyakini dapat menekan *capital outflow* dari dalam negeri.

Dirut BBJ, Stephanus Paulus Lumintang kepada media baru-baru ini di Jakarta mengungkapkan, SDB merupakan salah satu instrumen yang potensial dikembangkan oleh bursa berjangka. Namun selama ini belum dapat terlaksana dikarenakan belum adanya kajian akademis yang menjadi dasar terbitnya berbagai peraturan teknis dari otoritas.

"Melihat potensi perekonomian Indonesia yang semakin maju, SDB menjadi salah satu instrument yang menarik bagi investor baik dari dalam negeri maupun investor asing. Karena itu kami sudah menjalin komunikasi dengan otoritas untuk dapat menerbitkan berbagai peraturan terkait SDB," terang Paulus.

Lebih jauh diutarakan Paulus, berkembangnya instrument SDB di dalam negeri akan mendorong berkembangnya industri perdagangan berjangka komoditi. "Sebagaimana diatur di UU

No. 10 Tahun 2011, tentang perdagangan berjangka komoditi, terselenggaranya SDB di bursa berjangka akan memunculkan profesi baru seperti penasihat berjangka atau di mancanegara lazim dikenal *hedge fund*," katanya.

"Jadi kalau nantinya SDB ini ada di bursa berjangka, maka industri perdagangan berjangka komoditi makin ramai, dinamis dan likuiditasnya pun semakin tinggi," jelas Paulus.

Paulus mengakui, SDB beberapa tahun lalu sudah pernah diwacanakan di industri perdagangan berjangka komoditi. Namun pembahasannya belum tuntas dengan otoritas.

"Seandainya saat ini SDB sudah ada di bursa berjangka, dana repatriasi yang diprogramkan pemerintah dapat dikelola dengan maksimal. Dan, dana asing pun berpotensi masuk ke bursa berjangka. Makanya dalam waktu dekat kami akan 'marathon' dengan otoritas untuk membahas peraturan teknis SDB. Sehingga di masa mendatang industri ini semakin dinamis dan berkembang sesuai dengan amanat undang-undang," imbuh Stephanus Paulus Lumintang.

BBJ Luncurkan FTLC di Ubaya dan UKWK



Kolaborasi Bursa Berjangka Jakarta-BBJ, PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)- KBI dan perusahaan pialang berjangka PT Agrodana Futures melakukan kerjasama dengan dua perguruan tinggi di Jawa Timur, untuk mendirikan *Futures Trading Learning Center*- FTLC. Berdirinya FTLC itu ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan menambah wawasan seputar industri perdagangan berjangka komoditi di kalangan mahasiswa dan tenaga pengajar.

Penandatanganan kerjasama pendirian FTLC itu dilakukan secara terpisah yakni 15 September 2016 di Universitas

Surabaya- Ubaya. Selanjutnya pada 16 September 2016 di Univ. Katolik Widya Karya Malang- UKWK Malang. Bentuk kerjasama FTLC itu di antaranya melakukan ragam kegiatan yang bersifat edukatif, seperti seminar, lomba *online trading* hingga kompetisi penulisan artikel tentang perdagangan berjangka komoditi.

"FTLC ini merupakan salah satu wujud tanggungjawab BBJ dan KBI dalam sosialisasi perdagangan berjangka komoditi kepada masyarakat, khususnya kalangan akademisi sesuai amanat UU No. 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi," tegas Dirut BBJ, Stephanus Paulus Lumintang dalam keterangannya kepada media.

Menurut Paulus, berdirinya FTLC di Ubaya dan UKWK adalah dua kampus dari 17 kampus yang telah memiliki FTLC hasil kerjasama dengan BBJ, KBI dan perusahaan pialang berjangka. "Dalam waktu dekat kami juga akan membuka FTLC di Univ. HKBP Nommensen Medan," katanya.

"Keberadaan FTLC di kampus akan memperkecil *perception gap* yang selama ini terjadi di antara industri dengan dunia pendidikan, khususnya industri perdagangan berjangka komoditi. Di samping itu, FTLC menjadi suatu *enabler* harmonisasi antara dunia pendidikan yang menyediakan SDM dengan industri yang menyediakan lapangan pekerjaan," tegas Paulus.

BKDI Gandeng 3 Bank Kelola Dana Tax Amnesti

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI bakal menggandeng tiga bank persepsi untuk menjadi perantara dalam menampung dana repatriasi tax amnesti. Tiga bank yang dimaksud yakni CIMB Niaga, PT Bank Negara Indonesia Tbk., dan PT Bank Mandiri Tbk.

Dirut BKDI Megain Widjaja mengatakan, pasca keluarnya peraturan Menteri Keuangan yang menyatakan kontrak berjangka merupakan salah satu instrumen investasi untuk menyerap dana repatriasi tax amnesti, jajarannya langsung menjalin kerjasama dengan 3 bank persepsi.

"Dengan kerjasama itu, nantinya akan ada koordinasi antara BKDI dengan bank persepsi itu untuk memasarkan program tax amnesti," jelasnya.

Meski demikian dikatakan Megain, tindaklanjut kerjasama BKDI dengan 3 bank persepsi itu masih menunggu terbitnya aturan khusus di bidang transaksi kontrak berjangka. "Tetapi yang jelas, kami pun akan *improve* diri kami dengan cara sosialisasi produk unggulan kami kepada para pelaku pasar," katanya.

Seperti diketahui, pasca keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK. 08/2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani menambah kontrak berjangka komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia menjadi salah satu sarana pengelolaan dana tax amnesti. Terkait itu, Bappebti bersama



bursa berjangka, lembaga kliring dan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia- Aspebtindo, telah membentuk satuan tugas untuk menggodok aturan investasi kontrak berjangka bagi perusahaan pialang berjangka yang akan mengelola dana repatriasi.

Selain menerbitkan peraturan, satuan tugas itu juga akan membahas tentang mekanisme perdagangan, mengatur bank, dan konsep investasi secara keseluruhan, serta kriteria perusahaan pialang berjangka yang boleh mengelola dana repatriasi.

Inhil Bakal Wujudkan SRG Kelapa



Pemerintah Kab. Indragiri Hilir- Inhil, Riau, segera akan memberlakukan Sistem Resi Gudang- SRG untuk menstabilisasi harga komoditas kelapa yang merupakan komoditas unggulan di wilayah itu. Bupati Indragiri Hilir, Wardan, mengatakan, seiring keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-DAG/per/5/2016, tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan SRG, telah

berkoordinasi dengan Bappebti dan akan merancang dan menerbitkan peraturan daerah untuk memperkuat regulasi SRG kelapa.

Menurut Wardan, SRG kelapa merupakan usulan Pemda Kabupaten Indragiri Hilir kepada Menteri Perdagangan. Hal itu dikarenakan harga kelapa yang cenderung rendah tak memberi keuntungan kepada petani. Padahal kelapa merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Indragiri Hilir.

"Dengan adanya SRG kelapa, petani akan memiliki patokan harga yang sesuai dengan harga pasaran. SRG juga dapat menekan terjadinya praktik monopoli harga yang kerap dilakukan pihak distributor dan industri hilir. Dengan demikian SRG kelapa dapat meningkatkan kesejahteraan warga Indragiri Hilir," terang Wardan.

Jelang implementasi SRG kelapa di Kab. Indragiri Hilir, Pemda juga berupaya menggelar *workshop* tentang pemanfaatan bagian-bagian dari kelapa, di samping kopra yakni sabut kelapa, air kelapa, dan tempurung kelapa. Sementara itu, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal- BKPM, total luas lahan kebun kelapa di Kab. Indragiri Hilir mencapai 442.335 hektare, dengan total produksi mencapai 365.000 ton per tahun.



Kemendag Tetapkan Harga Acuan 7 Komoditas Pangan

Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk menurunkan dan menciptakan stabilitas harga pangan. Untuk itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengeluarkan peraturan baru yang berisi penetapan 7 (tujuh) komoditas pangan. Masing-masing komoditas beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi.

"Kami berharap para petani lebih sejahtera, para pedagang mendapat keuntungan yang wajar dan konsumen mendapatkan harga yang lebih terjangkau," tegas Mendag Enggar di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Penetapan tujuh komoditas pangan ini tertuang dalam Permendag No. 63/M-DAG/PER/09/2016 tentang Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Penetapan ini sekaligus sebagai tindak lanjut amanat Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pada Permendag itu, ditetapkan pula dua jenis harga acuan untuk tiap komoditas, yaitu harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen. Harga acuan ini akan berlaku selama 4 (empat) bulan dan akan dievaluasi sesuai kondisi yang berkembang.



"Fluktuasi harga ketujuh komoditas tersebut akan dipantau terus-menerus. Jika harga pembelian di bawah harga acuan dan harga penjualan berada di atas harga acuan, maka pemerintah akan melakukan langkah-langkah stabilisasi harga," tegas Enggar.

Penetapan harga acuan tersebut diharapkan dapat mengendalikan harga di tingkat konsumen, tapi tetap menguntungkan bagi petani dan peternak. Harga acuan juga menjadi referensi bagi Perum BULOG dan/atau BUMN lainnya dalam melaksanakan penugasan Pemerintah terkait upaya stabilisasi harga. 

GAPKI: Jaga Stok Lokal Batasi Ekspor CPO



Indonesia mulai membatasi volume ekspor minyak sawit (*crude palm oil*- CPO dan turunannya). Hal itu lantaran menipisnya cadangan minyak sawit dalam negeri selama tiga bulan terakhir. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia-GAPKI mengungkapkan stok minyak sawit Indonesia selama tiga bulan terakhir telah berada di bawah 2 juta ton. Pada Juli 2016 produksi minyak sawit Indonesia mulai merangkak naik setelah mengalami penurunan selama dua bulan berturut-turut. "Produksi minyak sawit Indonesia pada Juli tercatat naik 3,4 % dibandingkan pada bulan sebelumnya. Naiknya produksi didukung dengan mulai ada hujan pada bulan sebelumnya.

Produksi masih belum maksimal karena dampak El-Nino tahun lalu masih tetap dirasakan," terang Direktur Eksekutif GAPKI, Fadhil Hasan, dalam keterangan tertulisnya kepada media.

Dia menambahkan, naiknya produksi dan ekspor yang ditahan telah membantu meningkatkan stok minyak sawit dalam negeri. Stok minyak sawit pada Juli tercatat 1,88 juta ton atau naik 4 % dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 1,8 juta ton. Ekspor minyak sawit (CPO dan turunannya) Indonesia termasuk *biodiesel* dan *oleochemical* terus menunjukkan tren penurunan selama 3 bulan berturut-turut. Akibatnya, ekspor CPO dan turunan, *biodiesel* dan *oleochemical* pada Juli tercatat 1,74 juta ton atau turun 8 % dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu sebesar 1,89 juta ton. Sementara itu ekspor CPO dan turunannya ke negara-negara tujuan utama juga tercatat menurun, seperti China membukukan penurunan 39 % atau dari 259,94 ribu ton pada Juni turun menjadi 158,79 ribu ton di Juli. Penurunan ekspor yang secara persentase cukup signifikan dibukukan Amerika Serikat 49 %, atau dari 92,87 ribu ton pada Juni tergerus menjadi 47,73 ribu ton di Juli. Hal yang sama terjadi pada Pakistan dan Bangladesh yang masing-masing mencatatkan penurunan 46 % dan 37 %. 

Futures Broker Requirement as Repatriation Funding Manager

Head for Bureau of Legislation and Enforcement, Sri Hariyati explained to Coftra's Bulletin that futures broker company who will manage repatriation funding at futures exchange has to meet some requirement. These requirement will be stated on Regulation of Head for Coftra.

"Establishing those requirement, currently a team that was created by Head for Coftra is still working and listing problems. Referring to PMK No.123, that team will work for 3 months and was expected at the end of October the Coftra's Chief's regulation is existed in regards to repatriation funding management at futures exchange," She said.

The member of the team is includ Coftra, SRO, Aspebtindo and margin bank keeper that will be repatriation funding gate way as per Monetary Ministry's regulation.

Moreover Sri Hariyati stated as a clear picture, the futures broker company that is capable to manage repatriation funding has to to be active in multilateral transaction, on time in submitting daily/monthly/yearly financial report, not in frozen status, clean capital with appropriate MBD as per regulation and has desk commodity.

By meeting those various requirements, the futures broker company will receive permission from Coftra. The same thing happens when the futures broker company acts as market marker toward futures contract.



While on the potential investor side, is required to show transacted funding through tax amnesty. "On later process that funding will be placed on separate special account at futures company so that the movement can be monitored daily," Sri Hariyati added. 

PEKI, The Marketing Tool for National Coffee

Indonesia as one of coffee producer in the work with it's magnificent quality has been an easy target for foreign player. It is why national coffee exporter player sometimes having unhealthy competition at the field. Even the negative impact of the unhealthy competition is leading to market domination so the government will be struggled in managing the coffee trading mechanism.

Responding to that problem, Head for Coftra, Bachrul Chairi stated that they party is currently in the middle of analyzing the possibility of breakthrough solution through registering concept of trade registration for export and price discovery at futures exchange. "This breakthrough on later stage will be done by futures exchange by creating PEKI – Indonesian Coffee export portal," Bachrul Chairi said.

Through PEKI, he added, the government & coffee business player will has the information and data on potential coffee export. Besides that, PEKI will also be able to map coffee trading in Indonesia.

Moreover Bachrul also said that by the availability of those data, national coffee exporter will be able to determine the strategy of coffee marketing in facing foreign companies that are able to control trading through marking up volume information of Indonesia coffee export market. "The formation of coffee price at futures exchange will help farmers and exporters to gain price reference to determine their coffee selling price," He explained.

On the other side as explained by Bachrul Chairi, the implementation of coffee contract registration in futures exchange for export purpose is saving some economic benefits. One of the benefits is the gaining of aggregate data of contract commitment from type, quality and shipping month of national coffee export. The data stored on the portal also can give picture of risk dimension of export forward contract for export player. 



Fitriyani
08538070xxxx
Mahasiswa IPB

Tanya;
Yth. Bappebti, saya tertarik dan menaruh minat untuk mendalami mekanisme Pasar Lelang Komoditi dan juga Sistem Resi Gudang (SRG). Terkait itu, saya mohon diberi informasi alamat pasar lelang Bandung dan gudang SRG Cianjur, Jabar.

Jawaban:
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Pasar Lelang Komoditi Jawa Barat dan Sistem Resi Gudang Cianjur, Anda dapat menghubungi alamat berikut ini;

Koperasi Pasar Lelang Jawa Barat
Jl. Sampurna 18, Bandung, Jawa Barat

Gudang SRG Kab. Cianjur
Jl. Raya Cianjur Sukabumi Km 8 Kp. Cijoho RT 01/14
Desa Jambudipa Kec. Warung Kondang Kab. Cianjur, Jawa Barat

Terima kasih.

Layanan SMS Center BAPPEBTI
Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901

Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN

*SMS dikenakan biaya regular (tergantung dari masing-masing provider telepon)

Glossary

1. Deep in/deep out
Describes an option where the underlying is either well above or well below the strike price. A deep in-the-money option, therefore, has a high intrinsic value, whereas a deep out-of-money option has little or no intrinsic value and is made up largely or totally of time value.

2. Deep out-of-the-money
Used to describe an option that is unlikely to go into-the-money prior to expiration. An arbitrary term.

3. Default
Failure to meet a margin call or to make or take delivery. The failure to perform on a futures contract as required by exchange rules.

4. Deferred (Delivery) Month
The more distant month(s) in which futures trading is taking place, as distinguished from the nearby (delivery) month.

5. Deferred delivery
Futures trading in distant delivery months.

6. Deferred pricing
A method of pricing where a producer sells his commodity now and buys a futures contract to benefit from an expected price increase. Although some people call this hedging, the producer is actually speculating that he can make more money by selling the cash commodity and buying a futures contract than by storing the commodity and selling it later. (If the commodity has been sold, what could he be hedging against?).

7. Deflation
A decline in the prices of goods and services.

8. Deliverable
A deliverable contract is one which allows the physical commodity or instrument described in the contract to be tendered or received in settlement of the contract.

9. Deliverable Grades
The standard grades of commodities or instruments listed in the rules of the exchanges that must be met when delivering cash commodities against futures contracts.

10. Delivery
The tender and receipt of the actual commodity or financial instruments, in settlement of a futures contract. Note that for many futures contracts, no delivery position exists but settlement is made in cash.

PERKEMBANGAN TRANSAKSI
PASAR LELANG FORWARD KOMODITI AGRO TAHUN 2016
per 31 Juli 2016

No	Penyelenggara	Pasar Lelang ke-		Nilai Transaksi
1	Bandung, Jawa Barat	1	28-Jan-16	Rp697.600.000
		2	29-Feb-16	Rp517.100.000
		3	1-Mar-16	Rp799.500.000
		4	31-Mar-16	Rp401.800.000
		5	28-Apr-16	Rp453.720.000
		6	26-May-16	Rp396.604.000
		7	23-Jun-16	Rp115.000.000
		8	28-Jul-16	Rp1.041.105.000
				Rp4.422.429.000
2	Padang, Sumatra Barat	1	16-Feb-16	Rp3.280.110.000
		2	29-Mar-16	Rp1.486.470.000
		3	12-Apr-16	Rp844.530.000
		4	10-May-16	Rp1.373.660.000
		5	19-Jul-16	Rp1.723.520.000
				Rp8.708.290.000
3	Jawa Timur	1	23-Feb-16	Rp4.755.000.000
		2	22-Mar-16	Rp36.022.540.000
		3	26-Apr-16	Rp16.220.000.000
		4	10-May-16	Rp17.895.000.000
		5	21-Jun-16	Rp10.957.680.000
		6	26-Jul-16	Rp27.735.500.000
				Rp113.585.720.000
4	Lampung	1	18-Feb-16	Rp55.605.000
		2	19-Apr-16	Rp3.293.090.000
		3	13-May-16	Rp1.481.772.500
				Rp4.830.467.500

Sumber : BAPPEBTI

No	Penyelenggara	Pasar Lelang ke-		Nilai Transaksi
5	Yogyakarta	1	2-Mar-16	Rp10.911.550.000
		2	23-Mar-16	Rp914.000.000
		3	20-Apr-16	Rp673.000.000
		4	25-May-16	Rp214.000.000
				Rp12.712.550.000
6	Sulawesi Utara	1	3-Mar-16	Rp2.038.950.000
		2	31-Mar-16	Rp2.450.000.000
		3	25-Apr-16	Rp4.877.250.000
		4	10-May-16	Rp9.832.580.000
		5	2-Jun-16	Rp2.225.900.000
		6	21-Jul-16	Rp8.073.030.000
				Rp29.497.710.000
7	Sulawesi Selatan	1	7-Apr-16	Rp375.000.000
				Rp375.000.000
8	NTB	1	21-Apr-16	Rp1.355.000.000
				Rp1.355.000.000
9	Jambi	1	28-Apr-16	Rp2.433.400.000
		2	28-Jul-16	Rp375.050.000
				Rp2.808.450.000
10	Sulawesi Tenggara	1	28-Apr-16	Rp531.010.000
		2	4-May-16	Rp41.635.000
				Rp572.645.000
11	Gorontalo	1	31-May-16	Rp1.957.800.000
				Rp1.957.800.000
12	Jawa Tengah, Semarang	1	25-Apr-16	Tidak Ada Transaksi
		2	3-Jun-16	Rp55.000.000
		3	30-Jul-16	Rp4.045.000.000
	Cilacap			Rp4.100.000.000
GRAND TOTAL				Rp184.926.061.500

Gudang SRG Sokong Swasembada Komoditi Pangan

Wahhh,,, nak Bee sudah datang lagi nih?
Saya jadi punya teman lagi untuk bincang-bincang.

Selamat siang Pak Tono!!! Apa kabar?
Kok tampak termenung sih???

Oh begitu ya pak???
Pola tanam seperti bagus 'loh pak. Keuntungannya,
salah satunya menjaga stabilisasi pasokan dan harga tetap tinggi.
Dan yang lebih penting lagi, struktur tanah menjadi tak jenuh.

Wahhh,,, 'nak Bee pintar dan banyak
pengetahuannya juga ya???

Ah, Pak Tono bisa saja,,, saya juga sedikit mengerti karena membaca buku dan mendapat penjelasan dari dosen di kampus.
Tapi kalau boleh saran pak, tanam tanaman jagung saja. Kan pemerintah sedang canangkan swasembada jagung,
yang tujuannya untuk mengurangi volume impor.

Tentu saja bisa pak!

Benar 'nak Bee. Saya juga lihat berita di tv, pemerintah terus menggalakan tanaman jagung di berbagai daerah.
Tadinya Bapak pun berpikir seperti itu 'nak Bee. Cuma Bapak ragu,
apakah nantinya kalau harga jagung rendah bisa dimasukkan ke gudang SRG.

Ia pak. Tapi kok Pak Tono seperti ada yang dipikirkan 'nih?

Tapi 'nak Bee, gudang SRG
yang ada di desa ini 'kan berisi gabah,,,?

Begini pak, dalam ketentuan SRG komoditi yang di simpan di gudang memang
tidak boleh dicampur dengan komoditi lainnya. Namun, jika gudang SRG itu
sudah kosong bisa saja digunakan menyimpan komoditi jagung. Yang penting
mengikuti ketentuan penyimpanan jagung, sehingga kualitasnya tetap
terjaga hingga jatuh tempo.

Semoga hasil panennya melimpah ya pak!
Saya juga mau pamit dulu 'nih pak,
mau sampaikan surat dari kampus ke kepala desa.

Sip deh Pak!!!!

Benar 'nak Bee. Bapak lagi mikir-mikir 'nih, setelah panen gabah kemarin
Bapak mau menanam apa lagi? Sebab biasanya di desa ini
setelah tanam padi, berganti dengan tanaman lain.

Jadi begitu ya 'nak Bee.
Sesuai dengan saran 'nak Bee, sekarang pun
Bapak akan persiapan menanam jagung,,,

Baik 'nak Bee. Tapi nanti kita lanjutkan lagi ya, obrolannya.



Kredit Modal Kerja dengan Jaminan Resi Gudang

*) Dany Cahya Rukmana

Komoditi pertanian memiliki pola *supply and demand* yang berbeda-beda dan perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh momentum musim panen. Sebagian komoditi pertanian memiliki pola musiman, yaitu musim panen di mana pada saat *supply* produksi lebih tinggi dari permintaan sehingga harga komoditi tersebut menjadi murah. Namun di sisi lainnya, terdapat musim di mana *supply* komoditi lebih rendah dari permintaan sehingga harga bergerak naik dari harga saat musim panen. Fluktuasi harga tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi produsen komoditi pertanian terutama untuk produsen kecil, sehingga dapat mengganggu rantai *working capital (supply chain proses)* untuk penanaman kembali komoditinya tanpa melakukan penjualan produksinya saat musim panen.

Dalam mengatasi fluktuasi harga tersebut, diperlukan pemerataan *supply* komoditi di pasar sepanjang musim, yakni

dengan strategi melakukan penyimpanan produksi- *warehousing* saat panen untuk didistribusikan ke pasar secara proporsional sepanjang musim sesuai dengan permintaan konsumen.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan usaha pasca panen yang dapat menjamin ketersediaan komoditi pertanian baik volume maupun kualitas sesuai dengan permintaan. Dan dalam artikel ini, penulis memaparkan tentang pembiayaan yang ditawarkan perbankan khususnya Bank Rakyat Indonesia- BRI untuk pendanaan kebutuhan keuangan dengan jaminan resi gudang dalam rangka usaha produksi komoditi pertanian secara berkesinambungan, optimal dan lebih menguntungkan.

Perbedaan harga komoditi yang diakibatkan *supply* komoditi yang melimpah pada musim panen dan terbatas pada musim lainnya, akan mendorong bisnis penyimpanan komoditi sepanjang perbedaan harga tersebut masih memberikan keuntungan bagi

penyimpanan. Pada umumnya, jumlah persediaan yang disimpan di gudang- *warehousing* menjadi komponen dalam perhitungan modal kerja, sehingga apabila mengajukan kredit hal ini termasuk kategori yang dapat dibiayai melalui fasilitas kredit modal kerja dari bank.

Sebelum ditetapkan ketentuan mengenai Sistem Resi Gudang (sesuai UU No. 9 Tahun 2006, yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 9 Tahun 2011), pemberian kredit dengan jaminan persediaan di gudang- *warehousing receipt* telah ditawarkan bank kepada nasabah tertentu berdasarkan *Collateral Management Agreement*- CMA secara *tripartite* antara bank, pengelola agunan dan pemilik barang.

Prinsip dasar pemberian Kredit Modal Kerja dengan pola CMA tersebut adalah; (a) *Collateral Management Agreement* disepakati oleh setiap pihak yang menandatangani yaitu bank, debitur dan pengelola agunan, (b) *Warehousing*

receipt diterbitkan pengelola agunan berdasarkan jumlah barang yang diterima di gudang, (c) berdasarkan *warehousing receipt* tersebut, bank memberikan fasilitas kredit kepada debitur, (d) hanya akan dikeluarkan dari gudang setelah ada instruksi pengeluaran tertulis dari bank, (e) pengikatan jaminan dilakukan dengan menggunakan lembaga fidusia.

Modal Kerja

Setelah keluarnya UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, maka tahun 2008 Bank BRI menerbitkan Surat Edaran- SE Petunjuk Pemberian Modal Kerja dengan jaminan Resi Gudang. SE ini memuat aturan pemberian kredit dengan berlandaskan kepada seluruh ketentuan dalam UU No. 9 tersebut. Komoditas yang dapat dibiayai dengan jaminan resi gudang adalah komoditi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, garam, kopra, timah dan teh.

Pemberian kredit dapat bersifat transaksional (per resi gudang) atau secara *plafond* (ditetapkan maksimum penarikan dan ditarik berdasarkan beberapa resi gudang). Untuk pinjaman secara transaksional jangka waktu kredit maksimum selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk yang secara *plafond* jangka waktu kredit maksimum satu tahun.

Ketentuan kredit lainnya merupakan upaya mitigasi risiko yang melekat kepada pemberian kredit dengan jaminan resi gudang, yaitu (a) nilai pembiayaan kredit maksimal 70 % dari nilai resi gudang (untuk mitigasi risiko fluktuasi harga), (b) jangka waktu kredit harus lebih pendek dibandingkan dengan jangka waktu resi gudang (untuk memitigasi risiko daya simpan komoditas), (c) gudang penyimpanan harus memiliki Standar Teknis Pengelolaan (untuk mitigasi risiko penyusutan dan penurunan kualitas barang), (d) resi gudang yang dibiayai harus didaftarkan ke Pusat Registrasi Resi Gudang (untuk mitigasi risiko keabsahan resi gudang), (e) resi gudang

yang dapat dijadikan jaminan kredit harus dengan penutupan asuransi kerugian dan asuransi *fidelity (optional)* untuk menutup kerugian karena kecurangan pengelola gudang).

BRI Memberikan 2 (dua) jenis fasilitas kredit resi gudang, yaitu Kredit Resi Gudang Komersial dan pola Kredit Resi Gudang Bersubsidi. Suku bunga untuk resi gudang adalah suku bunga komersial yang berlaku di BRI. Untuk pola subsidi, debitur yang memenuhi syarat akan mendapat subsidi bunga dari pemerintah sebesar 6,5 % per tahun.

Kriteria debitur yang memenuhi syarat perolehan subsidi bunga adalah petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi. Maksimal kredit per petani untuk pola subsidi adalah Rp 75 juta. Perbankan yang ditunjuk pemerintah menyalurkan kredit resi gudang adalah Bank BRI, Bank BJB, Bank Jateng, Bank Kalsel, Bank Lampung dan Bank Jatim.

Perkembangan KMK Resi Gudang

Berdasarkan data perkreditan *Outstanding* dan jumlah debitur fasilitas kredit modal kerja- KMK dengan pola CMA dan pola resi gudang adalah sebagai berikut;

Outstanding dan Jumlah Debitur Fasilitas KMK Pola Resi Gudang dan CMA BRI

Fasilitas	Desember 2011		Desember 2012		Desember 2013		Desember 2014		Desember 2015		Maret 2016	
	Rp.	Deb	Rp.	Deb	Rp.	Deb	Rp.	Deb	Rp.	Deb	Rp.	Deb
CMA			314.613	8	485.918	12	260.470	12	377.649	12	278.812	12
Resi Bersubsidi	1.175	5	5.227	8	619	1	0	0	15.830	11	2.520	2
Resi Komersil	696	1	3.508	4	3.039	4	1.076	2	0	0	0	0

Sumber data : Internal BRI

Data tersebut menunjukan bahwa pemanfaatan fasilitas KMK pola CMA secara nasional hanya dimanfaatkan oleh 12 nasabah untuk KMK komoditi gula. Penyaluran kredit untuk KMK resi gudang komersial masih sangat kecil yaitu angka tertinggi hanya ada 4 nasabah dengan komoditi beras.

Fasilitas KMK resi gudang bersubsidi masih digunakan paling banyak 11 nasabah dengan realisasi per tahun Rp 12 miliar. *Plafond* KMK resi gudang bersubsidi yang dialokasikan BRI dari pemerintah sebesar Rp 20 miliar. Mayoritas pengguna fasilitas kredit KMK resi gudang bersubsidi adalah petani kopi di Provinsi Aceh.

*) EVP Business Internal Bank BRI. (disarikan dari makalah pada seminar 'Meningkatkan Kepercayaan Sistem Resi Gudang Melalui Lembaga Penjaminan' 1 Juni 2016, Jakarta).

Literasi Kunci Sukses Bisnis Future Trading

Natanael Ketaren

'Anak Medan' yang satu ini, pantang menyerah dalam menghadapi masalah dan tantangan. Terbukti, selama 20 tahun tekun menggeluti bisnis futures trading. Berbagai prestasi yang diterima perusahaannya pun sudah dikantongi.

Pahit-manis atau pun pasang-surut perdagangan berjangka komoditi sudah dilalui Natanael Ketaren, setidaknya direntang waktu 20 tahun terakhir. Di usia yang masih tergolong muda saat itu, Natanael begitu dia akrab disapa, sudah menekuni praktik perdagangan berjangka komoditi.

Dan hingga kini, nyaris tak ada rasa jenuh bagi dirinya berkariir di industri perdagangan komoditi. Bahkan dia pun optimis industri ini kelak bakal menjadi alternatif investasi yang menguntungkan masyarakat.

Sebab itu, literasi dan wawasan masyarakat terhadap investasi perdagangan berjangka komoditi menjadi prioritas bagi PT. Inter Pan Pasifik Futures- Inter Pan yang dikomandoinya sejak tahun 2010, lalu.

"Sama halnya ketika kita memiliki sebuah kendaraan. Kalau kita tidak mengenali fungsi-fungsi dari bagian kendaraan itu, maka kita akan sulit untuk mengendarainya dengan aman dan nyaman," terang Natanael Ketaren kepada **Buletin Bappebti** di sela-sela peresmian berdirinya *Futures Trading Learning Center*- FTLC Bursa Berjangka Jakarta-BBJ di Univ. HKBP Nommensen Medan, Sumut, baru-baru ini.

Berdirinya FTLC di Univ. HKBP Nommensen Medan, itu, merupakan hasil kerjasama antara BBJ, PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan PT. Inter Pan Pasifik Futures.



"Saya mengenal industri ini sejak tahun 1996. Di mana saat itu, teknologi informasi yang menjadi sarana perdagangan belum seperti saat ini canggihnya, peraturan pemerintah pun belum ada yang memayunginya. Tapi meski dengan segala keterbatasan saat itu, kami sangat *enjoy* menghadapi semua tantangan. Dan hasilnya tanpa rasa 'membusungkan dada', perusahaan kami bisa bertahan dan bahkan berkembang hingga saat ini," ucap suami dari Amenda Tarigan, ini.

Jadi intinya, kata Natanael lebih lanjut, industri ini harus dikenalkan kepada masyarakat. Itu pula yang menjadi tujuan Inter Pan berkontribusi mendirikan FTLC di Univ. HKBP Nommensen.

"Selain memberi pengetahuan praktis tentang perdagangan berjangka kepada mahasiswa dan staf pengajar Univ. HKBP Nommensen, Inter Pan juga menyumbangkan sebanyak enam unit computer di FTLC yang menjadi sarana simulasi *trading*," ujar Natanael.

Menurut Natanael Ketaren, cikal bakal berdirinya Inter Pan dimulai dari perusahaan *commision house*. "Waktu itu masih dengan nama lain, karena belum ada undang-undang yang mengatur perdagangan berjangka. Saya bergabung di perusahaan itu tahun 1996,

menempati posisi sebagai marketing," kisahnya.

Beberapa tahun kemudian, karirnya terus meningkat. Tapi di tahun 2001, dia mencoba peruntungan di perusahaan lain. Dan di tahun 2004, pria kelahiran Medan, 26 Desember 1972 ini, memutuskan untuk kembali ke Inter Pan. Alhasil, di tahun 2010 Sarjana Teknik Elektro ini dipercaya menempati posisi Direktur Utama PT Inter Pan Pasifik Futures.

Menjalani proses dari bawah yaitu seperti tenaga marketing dan hingga sekarang menjadi direktur utama tentu banyak masalah atau pun hambatan yang dihadapi. Tapi semua itu sudah terbayar dengan pencapaian dan bertumbuhnya bisnis yang terus membaik dari tahun ke tahun.

"Saya juga sangat merasa bangga

ketika perusahaan mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak yang kompeten di bidangnya," ungkap Natanael yang memiliki motto hidup "*Do the Best Everyday*".

Dari rentetan perjalanan karier Natanael, sangat wajar jika ayah dari Jordan Ketaren, Jordi Ketaren dan Kinar Ketaren, ini, sudah sangat akrab dengan industri PBK. Jika dikalkulasi, Natanael sudah bergelut di industri ini selama 20 tahun.

"Saya sudah mendapatkan kenyamanan di dunia *futures trading* dan belum terpikirkan untuk menjalani atau bekerja di luar industri ini," kata Natanael saat ditanya kemungkinan untuk banting setir mencari pekerjaan lain.

Di sisi lain, Natanael memiliki tekad dan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Direktur Utama PT. Inter Pan Pasifik Futures. Dia menegaskan, dia ingin menjadikan bisnis PBK ini bisa diterima dari berbagai kalangan masyarakat. "Tolak ukur industri ini bisa diterima masyarakat sangat sederhana, yakni di saat masyarakat sudah cakap untuk bisa mengambil keuntungan dan sekaligus memahami risiko bisnis *futures*."

"Risiko investasi *futures* ini memang bersifat '*high risk high return*'. Itu harus dipahami, baik calon nasabah maupun nasabah. Makanya, ketika tenaga marketing dan Wakil Pialang Berjangka akan bertemu dengan calon nasabah atau pun yang sudah menjadi nasabah di Inter Pan, saya tetap menekankan dan mengingatkan kepada mereka bahwa bisnis *futures* ini harus dijelaskan prinsip *high risk high return* itu," jelasnya.

Sehingga dengan mendapat penjelasan seperti itu, tambahnya, nasabah sudah memahami risiko bisnis ini. Karenanya, dia pun berpendapat, sosialisasi dan edukasi menjadi salah



satu faktor penting untuk menghasilkan nasabah-nasabah yang berkualitas.

Selain itu, dia bertekad untuk menempatkan Inter Pan sebagai perusahaan yang unggul dalam pelayanan dan nihil dalam pengaduan nasabah.

"Dengan itu citra positif industri PBK di masyarakat akan terangkat," ujar pria yang hobi membaca, mengajar, dan minum kopi ini.

Di bawah naiknya Natanael, sederet prestasi berhasil diraih Inter Pan. Di antaranya, pialang ini pernah dinobatkan sebagai Anggota Kliring Terbaik 1 tahun 2014 oleh KBI; Terbanyak 1 Transaksi Multilateral tahun 2014 dari BBJ; dan Pialang Berjangka Terbaik Berdasarkan Kinerja Keuangan tahun 2014 oleh Majalah Investor.

Customer Due Diligence Uji Tuntas Nasabah

Tindakan Pialang Berjangka



Identifikasi



Verifikasi



Pemantauan

(Peraturan Kepala Bappebti No. 2 Tahun 2016)

www.bappebti.go.id